

KAJIAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI BANGKODIR (BANGIL KOTA BORDIR) DI KELURAHAN POGAR KECAMATAN BANGIL KABUPATEN PASURUAN

Yasinta Faradilah Hardiyanti

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum

Universitas Negeri Surabaya

yasinta.fara@gmail.com

Muhammad Farid Ma'ruf

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum

Universitas Negeri Surabaya

muhammadfarid@unesa.ac.id

Abstrak

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat dengan perwujudan potensi yang mereka miliki. Pemberdayaan masyarakat sendiri menyangkut kepada dua kelompok yang saling berkaitan yaitu kelompok masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan kelompok yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan kajian pemberdayaan masyarakat melalui Bangkodir (Bangil Kota Bordir) di Kelurahan Pogar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan menggunakan sumber data sekunder. fokus penelitian menggunakan analisis teoritis yang dituangkan dalam bentuk kerangka kerja konseptual dalam Sulistyani, (2017) yang menggunakan pendekatan CIPOO (*context-input-process-output-outcome*). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi. Teknik ini dilakukan dengan mencari data yang berkaitan dengan penelitian yaitu melalui buku, surat kabar, transkrip dan data lainnya yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Teknik analisis data yang digunakan merupakan teknik analisis data menurut Krippendorff. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Kajian Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bangkodir (Bangil Kota Bordir) di Kelurahan Pogar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan telah dilaksanakan dengan cukup baik. Dari penjelasan diatas maka penulis memberikan saran adanya kenaikan upah untuk pengrajin bordir serta sosialisasi kepada generasi muda agar program ini bisa dapat tetap dilestarikan, Pembuatan inovasi terbaru agar terdapat ciri khas tersendiri untuk motif bordir yang ada di Pasuruan, serta diperlukan adanya sosialisasi di desa-desa terpencil agar program ini dapat dilakukan oleh semua masyarakat yang ada di Kabupaten Pasuruan dan adanya upaya agar Sentra Bordir dapat dibuka kembali dengan menerapkan protokol kesehatan agar pengusaha bordir dapat kembali memasarkan produknya.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Bordir, Masyarakat

Abstract

Community empowerment is an effort to make the community independent by realizing their potential. Community empowerment itself involves two interrelated groups, namely community group as the empoweres party and the group that cares about being the empoweing party. The author uses a qualitative approach with literature study methods and uses secondary data sources. The focus of the reseach uses theoretocal analysis which is outlined in the form of the conceptual framework in Sulistyani, (2017) which uses the CIPOO (*context-input-process-output-outcome*). The data collection technique is done by using documentation technique. Tshis technique is done by looking for data related to research, namely through books, newspaper, transcripts and other data related to community empowerment. The data analysis technique used is a data analysis technique according to Krippendorff. The results of these studies indicate that the Study of Community Empowerment through Bangkodir (Bangil, Embroidery City) in Pogar Village, Bangil District, Pasuruan Regency has been carried out quite well. From the explanation above, the authors suggest an increase in wages for embroidery craftsmen and socialization to the younger generation so that

this program can be preserved, Making the latest innovations so that there are special characteristics for embroidery motifs in Pasuruan, and socialization is needed in the villages. remote so that this program can be carried out by all people in Pasuruan Regency and there are efforts so that the Embroidery Center can be reopened by implementing health protocols so that embroidery entrepreneurs can return to market their products.

Keywords: Empowement, Embroidery, Public

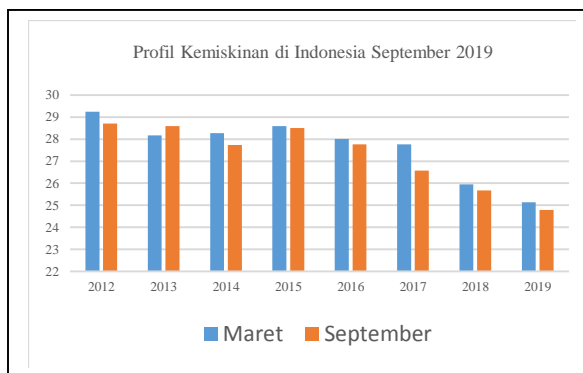
PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini mengalami penurunan dikarenakan karena kondisi pertumbuhan ekonomi global yang melemah. Hal tersebut dipengaruhi karena adanya pandemi Coronavirus Disease-2019 (Covid-19) yang merebak pada awal tahun 2020 yang menyebabkan berbagai negara mengurangi aktivitas perekonomian. Kondisi tersebut menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2020 yang dipengaruhi dari penurunan permintaan domestik.

Pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung sejak awal 2020 berpotensi menambah angka kemiskinan karena banyaknya tenaga kerja yang di PHK oleh perusahaan. Menurut Suparlan dalam Ginanjar et al., (2018) mengatakan bahwa kemiskinan merupakan sebagai suatu tingkat standar hidup yang rendah karena adanya kekurangan materi pada sejumlah orang dibanding dengan standar kehidupan yang umumnya berlaku di dalam masyarakat. Apalagi saat ini dengan adanya pandemi akan menambah semakin banyaknya warga yang miskin yang membuat pemerintah harus mempunyai kebijakan terbaru untuk mengatasinya. Menurut Nawangsari, (2017) kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensi yang berkaitan dengan aspek sosial, budaya dan aspek lainnya. Kemiskinan juga ditandai oleh adanya keterisolasian, keterbelakangan dan pengangguran yang akan semakin meluar di daerah, sektor serta antar golongan penduduk. Kemiskinan sendiri memiliki banyak segi, Sachs dalam Nanhthavong et al., (2020) menjelaskan bahwa kemiskinan dapat diukur dengan berbagai cara pada skala yang berbeda baik dari segi nasional maupun dari rumah tangga.

Menurut Sasmito & Nawangsari, (2019) Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh semua negara, semua provinsi dan semua daerah, kemiskinan muncul karena ketidakberdayaan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Adapun data mengenai kemiskinan penduduk Indonesia per tahun dapat dilihat dari tabel berikut.

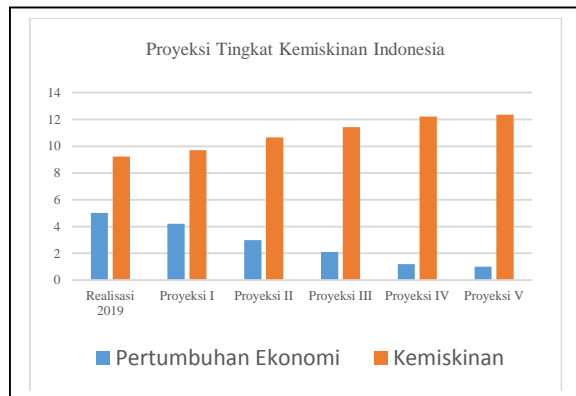
Grafik Kemiskinan di Indonesia Tahun 2012-2019



Sumber : Badan Pusat Statistik

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan dan angka ini merupakan yang terendah selama 20 tahun terakhir. Menurut data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin pada september 2019 sebesar 24,79 juta orang, menurun 0,36 juta orang terhadap Maret 2019 dan menurun 0,88 juta orang terhadap September 2018. Meskipun terdapat penurunan pada Tahun 2019 namun saat ini Indonesia mengalami adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak tenaga kerja yang di PHK. Berikut adalah data proyeksi tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2020:

Grafik Proyeksi Tingkat Kemiskinan Indonesia 2019



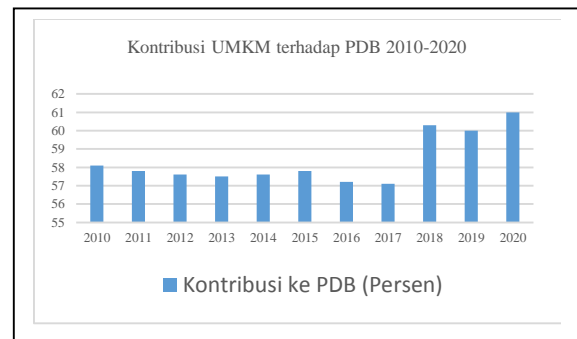
Sumber : Databoks

Data tersebut menunjukkan pelemahan ekonomi akibat Covid-19 yang berdampak terhadap peningkatan penduduk miskin di Indonesia. Jika ekonomi tumbuh hanya 1%, maka tingkat kemiskinan Indonesia akan mencapai 12,37%. Angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2019 yang memiliki kemiskinan satu digit yaitu sebesar 9,22%. di Jawa Timur sendiri dapat diketahui bahwa angka kemiskinan pada September 2019 adalah 10,20% sedangkan pada bulan Maret 2020 setelah ada pandemi meningkat menjadi 11,09%. Sedangkan di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2017 presentase penduduk miskin sebesar 10,34%, kemudian turun menjadi 9,45% di tahun 2018 dan pada tahun 2019 terjadi lagi penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Pasuruan menjadi 8,68%.

Untuk mengatasi masalah perekonomian tersebut, saat ini banyak masyarakat yang beralih profesi menjadi wirausaha untuk mencukupi berbagai kebutuhan rumah tangga. Untuk mengasah kemampuan masyarakat dalam memulai usaha kecil menengah tentunya pemerintah harus ikut andil dalam melakukan pelatihan agar masyarakat juga dibekali dengan kemampuan menjadi wirausahawan yang baik. sehingga diperlukan adanya usaha dalam menstabilkan perekonomian di Indonesia, salah satunya adalah dengan mendukung usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). UMKM sendiri diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Menurut Ardiyanti et al., (2015) perspektif perkembangan UMKM diklasifikasikan ke dalam 4 kelompok yaitu *Livehood Activities*, *Small Dynamis Enterprise*, *Micro Enterprise*, dan *Fast Moving Enterprise*. Usaha mikro

kecil dan menengah (UMKM) memiliki peranan penting bagi pengembangan sistem perekonomian di Indonesia. Pengembangan UMKM dibutuhkan untuk meningkatkan inovasi dan dukungan dari ekonomi kreatif, perluasan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja, pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), serta penyediaan jaring pengaman terutama bagi masyarakat yang berpendapatan rendah untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif. Dalam pengembangan UMKM tentunya diperlukan adanya peran pemerintah selaku pihak yang dapat memberdayakan UMKM di Indonesia terutama pemerintah daerah yang mengetahui dengan jelas potensi daerahnya karena potensi daerah disetiap daerah tentunya berbeda-beda tergantung dari karakteristik wilayah masing-masing.

Grafik Kontribusi UMKM terhadap PDB Tahun 2010-2020



Sumber : Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Grafik diatas merupakan grafik kontribusi UMKM terhadap PDB. Dapat diketahui bahwa kontribusi UMKM ditargetkan sebesar 61 persen pada tahun 2020. Jumlah tersebut meningkat 1,67 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Pemberdayaan merupakan suatu proses yang ditunjukkan untuk membantu masyarakat memperoleh daya (kuasa) untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan (Payne dalam Saugi dan Sumarno, 2015). Untuk keberhasilan pemberdayaan maka dibutuhkan adanya kesadaran dari masyarakat untuk mendorong motivasi dan kesadaran mereka agar tujuan dari pemberdayaan itu dapat berhasil. Menurut Hartadi et al., (2019) pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan dinamika kelompok

biasanya dilaksanakan dengan salah satu strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat belajar sehingga memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya.

Sedangkan pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Bancin dalam (Suparno, 2019), menyampaikan bahwa tujuan dari pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan membuka lapangan kerja.

Pemberdayaan UMKM adalah serangkaian upaya untuk menolong peluang usaha perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha kecil menurut undang-undang agar lebih berdaya dalam meningkatkan kapasitas dan kemampuannya dalam memanfaatkan potensi yang dimilikinya (Fahrudin dalam Suprayitno, 2018). Pemberdayaan UMKM diselenggarakan sebagai kesatuan dan pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Upaya pemberdayaan UMKM bukanlah suatu komitmen kebijakan jangka pendek, tetapi merupakan proses politik jangka panjang. Keterlibatan *stakeholder* sangat menentukan keberhasilan pemberdayaan ini, adapun *stakeholder* yang dimaksud terdiri dari instansi pemerintah, lembaga pendidikan, LSM, koperasi, perbankan dan asosiasi usaha. Menurut Suprayitno, (2018), pemberdayaan UMKM terdapat beberapa akses yaitu akses pemodal, akses pelatihan UMKM, Akses pasar serta akses dalam peningkatan kualitas produk.

Di masa pandemi ini, pemberdayaan tentunya mengalami banyak tantangan dalam pelaksanaannya karena lingkungan yang kurang kondusif. Keberhasilan dari pemberdayaan adalah adanya hubungan yang baik antara pihak pemberdaya dengan masyarakat. Namun pada saat pandemi seperti ini masyarakat harus tetap berada di dalam rumah sehingga akan mempersulit pihak pemberdaya untuk mencapai tujuannya karena adanya keterbatasan ruang gerak yang membuat semua kegiatan juga terhambat. Untuk mengatasi masalah tersebut, adapun upaya yang

dilakukan oleh pemerintah salah satunya adalah melalui pemberdayaan online seperti melalui kartu prakerja. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dengan mengikuti berbagai pelatihan yang telah disediakan sehingga dapat melahirkan wirausahawan baru yang mandiri dan kompeten. Apalagi saat ini banyak masyarakat yang menjadi korban PHK sehingga membuat angka pengangguran semakin meningkat. Dengan adanya kartu prakerja ini masyarakat dapat mengaksesnya secara online sehingga pemberdayaan ini bisa diterapkan selama pandemi.

Semakin hari jumlah masyarakat yang beralih profesi menjadi pengusaha semakin bertambah terutama di Jawa Timur. Banyak yang memulai bidang usaha dari bisnis kuliner, bisnis travel hingga bisnis transportasi online. Untuk meningkatkan jumlah pengusaha yang ada di Jawa Timur, ada berbagai program dari pemerintah daerah yang bertujuan untuk menyentuh masyarakat melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Pemerintah menggandeng berbagai instansi dan lembaga termasuk karang taruna untuk mengurangi pengangguran dan menciptakan wirausahawan baru.

Salah satu wilayah yang ada di Jawa Timur yang mempunyai potensi daerah yang tinggi adalah di Pasuruan. Pasuruan sendiri terkenal dengan berbagai macam potensi daerahnya. Mulai dari kawasan perindustrian, daerah pertanian dan perikanan, serta tempat wisata sehingga dapat menjadikan daerah ini menjadi daerah dengan potensi bisnis yang cukup baik bagi penduduknya. Dengan luas lahan sekitar 147.401,50 Ha yang terdiri dari 24 kecamatan, 24 Kelurahan, 341 desa, serta 1694 pendukuhan, sedikitnya ada sekitar 1.510.261 jiwa yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Pasuruan. Wilayah Pasuruan sendiri merupakan wilayah yang strategis untuk memulai suatu usaha karena letaknya di jalur lalu lintas utama perekonomian dari wilayah Surabaya ke Malang serta Surabaya ke Banyuwangi. Sehingga kondisi tersebut dapat memberikan keuntungan yang cukup besar kepada masyarakat setempat.

Kabupaten Pasuruan sendiri mempunyai berbagai program unggulan untuk menunjang kehidupan masyarakatnya. Adapun program unggulan yang disampaikan dalam Musrenbang RPJMD tahun 2018-2023 tersebut meliputi Wak Moqidin (Wayah e Kumpul Membangun TPQ dan Madin), Perwira Keluarga (Perempuan Wirausaha Berbasis Keluarga),

Pelasan (Pelatihan Santri), Satrya Emas (Pusat Strategi dan Layanan Ekonomi Maslahat), dan lain lain. Program unggulan pemerintah Kabupaten Pasuruan tersebut tentunya tidak hanya menjadi jargon saja namun juga dapat dikenal dan dimengerti secara luas oleh masyarakat Kabupaten Pasuruan.

Sedangkan di Kecamatan Bangil terdapat program pemerintah yang disebut dengan Bangkodir (Bangil Kota Bordir). Bangkodir sendiri merupakan suatu program pemerintah Kabupaten Pasuruan yang ada dibawah unit Administrasi Ekonomi dan Pembangunan yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro serta Aspendir (Asosiasi Pengusaha Bordir). Dipilihnya Bangil sendiri tidak lain adalah karena industri tenun yang ada di daerah ini terbilang cukup pesat daripada industri lain seperti industri kayu, kulit, logam, anyaman serta makanan dan minuman. Dari 229 industri tersebut, 100 diantaranya adalah industri tenun yang menduduki peringkat pertama dari segi industri rumah tangga sehingga Pemerintah Kabupaten Pasuruan memberikan julukan Bangil Kota Bordir karena mereka melihat jika masyarakat Bangil memang antusias dalam menjalani industri ini. Tujuan dari adanya program ini adalah untuk memberdayakan masyarakat Bangil terutama perempuan yang secara aktif mencari nafkah. Berikut adalah data penduduk yang mendalami industri tenun yang ada di Kecamatan Bangil (Pratama et al., 2016):

Data Industri Tenun di Kecamatan Bangil Tahun 2014

No	Desa/Kelurahan	Jumlah
1.	Kolursari	15
2.	Kiduldalem	20
3.	Pogar	15
4.	Kauman	-
5.	Bendomungal	13
6.	Kersikan	7
7.	Gempeng	-
8.	Derma	-
9.	Latek	-
10.	Raci	-
11.	Manaruwi	5
12.	Kalirejo	15
13.	Tambakan	3
14.	Kalianyar	7
15.	Masangan	-
	Total	100

Sumber : Pengembangan Ekonomi Lokal Bordir

Bangil di Kabupaten Pasuruan

Di bawah ini adalah beberapa data nama UMKM bordir yang ada di Kecamatan Bangil (Abid, 2017):

Data UMKM Bordir di Kecamatan Bangil Tahun 2017

Nama Usaha	Tipe	Tenaga Produksi
Nizar Bordir	Pabrik	Komputerisasi
Faiza Bordir	Industri Bordir	Sumber Daya Manusia
Luluk Bordir	Industri Bordir	Sumber Daya Manusia
Fath Bordir	Industri Bordir	Komputerisasi

Sumber : Pengaruh Kemampuan dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan UKM Bordir di Kecamatan Bangil.

Bordir dapat diartikan sebagai hiasan yang dibuat diatas kain atau bahan-bahan lain yang menggunakan jarum jahit dan benang (Ardiyanti et al., 2015). Bordir Bangil sendiri merupakan suatu sektor industri pengolahan. Kebijakan yang mendukung dalam sektor ini tertuang pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 terkait Rencana Pengembangan Industri. Dalam RPJPD 2005-2025 terkait peningkatan daya saing industri diarahkan menjadi sektor kompetitif untuk menciptakan penyeimbangan struktur ekonomi melalui pendayagunaan potensi produksi dalam negeri.

Salah satu daerah yang mempunyai pengusaha bordir terbanyak yang ada di Bangil berada di kelurahan Pogar yaitu berjumlah 15 industri. Pogar sendiri berada di Jalan Pattimura yang merupakan lokasi strategis untuk mengembangkan usaha karena terletak di jalan protokol Jawa Timur yang menghubungkan Surabaya dengan Gunung Bromo, Prigen dan arah ke Bali. Pemilihan lokasi ini adalah karena kecamatan Bangil memiliki kerajinan bordir yang sangat berkualitas dan berciri khas. Meskipun di beberapa daerah Bangil terdapat beberapa pengrajin bordir namun sentra kerajinan bordir Bangil terletak di kelurahan Pogar karena lokasinya yang strategis untuk pengembangan usaha. Tempat Sekretariat Aspendir juga terletak di Pogar tepatnya di Sentra Bordir Bangil. Adapun UMKM yang ada di sentra bordir tersebut adalah Faiza Bordir, Hidayah Bordir, Luluk Bordir, Rameeza Bordir, Jordania Bordir, HNA Jaya Bordir,

Nina Bordir, Fath Bordir, Bordir Aminah, Nizar Bordir, Bordir HM Ali, Novaisa Bordir, Haris Bordir, Bordir Azizah dan Bordir Samsul.

Adapun bentuk program dari kegiatan Bangkodir ini adalah adanya pameran bordir yang diadakan hampir setiap tahunnya dan disertai dengan adanya Fashion Show Bordir yang diikuti oleh desainer maupun pemilik UMKM di Bangil sehingga dapat memperkenalkan hasil karya mereka di depan masyarakat. Dengan adanya program ini maka akan menambah *skill* pengrajin bordir sehingga mereka akan menghasilkan berbagai macam produk baru. Namun semenjak adanya pandemi Covid-19 ini banyak UMKM yang tidak berproduksi, mulai dari konfeksi, makanan dan minuman, batik, bordir, dll. Salah satu yang kesulitan dalam berproduksi adalah UMKM bordir karena Sentra Bordir yang ada di Pogar sendiri di tutup sejak 19 Maret 2020 oleh kepolisian setempat sebagai upaya untuk mengurangi kerumunan dan mengharuskan pengusaha melakukan kegiatan usahanya di rumah.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang **“Kajian Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bangkodir (Bangil Kota Bordir) di Kelurahan Pogar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan”**.

METODE

Pada penelitian yang berjudul “Kajian Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bangkodir (Bangil Kota Bordir) di Kelurahan Pogar, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan” penulis menggunakan jenis penelitian studi literatur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kab. Pasuruan kepada masyarakat yang tinggal di Bangil terutama pemberdayaan melalui kerajinan bordir. Fokus penelitian menggunakan analisis teoritis yang dituangkan dalam kerangka kerja konseptual dalam Sulistyani, (2017) yaitu menggunakan pendekatan CIPOO (*context-input-proses-output-outcome*). Peneliti akan melakukan deskripsi melalui sumber data sekunder berdasarkan data yang didapatkan melalui dokumentasi. Data Sekunder tersebut merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara yang diperoleh dari pihak lain. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mencari data yang berkaitan dengan penelitian, yaitu: buku, surat

kabar, jurnal, transkrip catatan dan data lainnya yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat. Adapun Jurnal dan buku yang digunakan adalah yang berkaitan dengan otonomi daerah, pemberdayaan, kemiskinan, bordir dan manajemen sumber daya manusia dengan kisaran tahun 2015 – 2020. Teknik analisis data yang merupakan analisis menurut Krippendorff (2018) yaitu analisis konten isi dengan cara membandingkan informasi mendalam terhadap suatu informasi tercetak yaitu dengan membandingkan penemuan dengan beberapa kriteria atau teori melalui studi literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan merupakan proses yang dilakukan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan yang dilakukan secara sistematis untuk mengubah pihak yang belum berdaya menuju keberdayaan. Umumnya pemberdayaan dilakukan kepada masyarakat yang lemah yaitu masyarakat yang mempunyai masalah kemiskinan. Tujuan pemberdayaan sendiri yaitu agar masyarakat memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bersifat fisik, sosial maupun ekonomi sehingga dapat lebih memiliki kepercayaan diri dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Sedangkan pemberdayaan masyarakat sendiri merupakan upaya dalam memandirikan masyarakat untuk menambah kemampuan dan potensi yang mereka miliki sehingga harkat dan martabat masyarakat dapat meningkat. Tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk memperbaiki pendidikan, aksesabilitas, tindakan, kelembagaan, usaha, pendapat, lingkungan, kehidupan, dan memperbaiki masyarakat itu sendiri. Untuk mengetahui pemberdayaan yang ada di masyarakat, adapun pendekatan yang dapat dilakukan adalah melalui analisis teoritis yang dituangkan terhadap kerangka kerja konseptual dalam Sulistyani, (2017) yaitu menggunakan pendekatan CIPOO (*context, input, process, output dan outcome*).

1. Context

Context adalah suatu konteks pemberdayaan agen pembaharu program yang nantinya akan dikembangkan dalam rangka pemberdayaan agen pembaharu. Adapun menurut Sulistyani, (2017) aspek dalam program tersebut meliputi:

a. Aspek Kelembagaan

Pada aspek kelembagaan terdapat beberapa lembaga yang menaungi berbagai unsur

kepentingan seperti pemerintah, swasta dan masyarakat. Dalam Bangkodir sendiri, peran pemerintah sangat penting dalam program ini. Ardiyanti et al., (2015) mengungkapkan bahwa pemberdayaan pengrajin bordir ini dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Selain itu, dapat diketahui juga dalam Mayor & Zakaria, (2019) bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Dinkop) juga memegang peranan penting dalam pemberdayaan pelaku-pelaku UMKM khususnya pelaku usaha bordir yang ada di Kabupaten Pasuruan. Disperindag sendiri turut andil dalam meningkatkan jumlah pengunjung ke kawasan Sentra Bordir dengan menambahkan sarana dan prasarana agar lebih menarik perhatian masyarakat. Sedangkan Dinkop bertugas sebagai *leading sector* dalam pemberdayaan usaha mikro yaitu dengan melakukan pengembangan dan pembinaan terhadap usaha tersebut.

Dalam aspek masyarakat, Ardiyanti et al., (2015) menyebutkan juga adanya asosiasi masyarakat yang bernama Aspendir (Asosiasi Pengusaha Bordir). Aspendir merupakan perkumpulan dari pengusaha bordir yang ikut andil dalam pemberdayaan pengrajin bordir yang ada di Bangil. Selain itu, mereka juga menjadi tempat untuk memperoleh informasi tentang pasar dan tempat untuk berbagi informasi antar sesama pengrajin bordir. Tak hanya pengusaha dari Bangil, anggota Aspendir juga ada yang dari kecamatan sekitar seperti Kecamatan Pandaan, Beji, Rembang serta Sukorejo. Tujuan mereka adalah agar produk kerajinan bordir Bangil bisa menembus pasar Nasional dan Internasional. Sekretariat Aspendir sendiri terletak di Sentra Bordir yang ada di Kelurahan Pogar.

Tak hanya lembaga pemerintah dan masyarakat yang ikut andil dalam program Bangkodir ini. Pratama et al., (2016) menyampaikan pihak swasta yang ikut andil yaitu perusahaan ekspedisi yang turut serta dan bekerjasama agar produk bordir bisa mencakup wilayah yang lebih luas. Adapun beberapa perusahaan swasta itu adalah TIKI, JNE, Pos, Herona Express via kereta, Benny Putra via kereta, Yun Cargo via laut, DMK Cargo via udara dan Lion Air. Dapat diketahui bahwa pengiriman tidak hanya dilakukan melalui jalur darat saja namun juga melalui jalur laut dan udara agar

produk bordir yang dihasilkan dapat menyebar ke seluruh wilayah yang ada di Indonesia maupun ke luar negeri.

b. Aspek Sistem Manajemen

Menurut Sulistyani, (2017) pada aspek ini, konteks pemberdayaan lebih diarahkan pada fungsi-fungsi manajemen NPM (*New Public Manajemen*) yang dapat diketahui bahwa NPM merupakan sebuah kegiatan pelayanan yang berorientasi pada hasil yang didapatkan daripada melihat pada proses yang dikerjakan karena sistem ini lebih menitikberatkan pada kerangka proses dan prosedur yang digunakan untuk memastikan apakah suatu organisasi dapat memenuhi standard dan menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan organisasi.

Program Bangkodir sendiri adalah program yang ditujukan untuk memberdayakan masyarakat terutama perempuan dan ibu rumah tangga agar tetap produktif berada di rumah karena kegiatan menjahit dapat dilakukan di rumah mereka sendiri. Pengerjaan bordir sendiri dituntut untuk kreatif dan memiliki ketepatan dalam pengerjaannya sehingga kegiatan ini lebih dilihat pada hasil produksinya daripada proses yang mereka kerjakan.

Dalam hal teknik bordir, menurut Ibu Yoenati Soewarno selaku ketua Aspendir mengatakan bahwa bordir yang ada di Pasuruan masih belum ada motif atau kekhasan yang membedakan dengan hasil bordiran kota lain. Orang awam akan sulit membedakan hasil bordiran khas Pasuruan dengan kota lain apabila mereka tidak membelinya sendiri di Pasuruan secara langsung. Sehingga belum ditemukan adanya inovasi terbaru dari teknik bordir yang ada di Pasuruan karena motif yang mereka gunakan sama dengan yang digunakan oleh bordir yang ada di kota lain.

Sehingga agar tetap dapat kompetitif di pangsa pasar maka adapun upaya yang dilakukan oleh pengusaha bordir yaitu dengan menggunakan strategi kepemimpinan biaya/biaya murah (*cost leadership*). *Cost leadership* merupakan upaya yang dilakukan perusahaan untuk menghasilkan keunggulan kompetitif dengan mencapai biaya terendah dalam industri. Dalam Bordir Bangil, banyak pengusaha bordir yang menekan biaya pada bahan baku. Pengusaha mengkombinasikan harga rendah dengan pengoptimalan sumber daya manusia sehingga produk yang dikeluarkan dapat

lebih banyak. Hal itu dilakukan agar permintaan tetap stabil sehingga kinerja pengrajin juga dapat meningkat.

c. Aspek Kinerja Organisasi

Aspek kinerja organisasi merupakan aspek yang sangat penting karena digunakan untuk penilaian kinerja yang mengukur keberhasilan suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu. Menurut Sulistyani, (2017) dalam aspek kinerja organisasi adapun peningkatan kemampuan organisasi tersebut dapat ditingkatkan melalui beberapa indikator yaitu efisiensi, efektivitas, produktivitas, akuntabilitas dan kualitas pelayanan yang baik.

Pada program ini, pihak Aspendir adalah yang memegang peranan penting dalam keberhasilan program Bangkadir ini karena mereka adalah sebagai pihak penghubung. Peran Aspendir sendiri adalah sebagai wadah pemberi informasi mengenai pasar kepada pihak pengusaha bordir agar mereka dapat lebih mudah dalam bertransaksi sehingga pekerjaan mereka bisa lebih efisien dan efektif karena bantuan dari Aspendir (Ardiyanti et al., 2015). Untuk menambah produktivitas masyarakat, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memberikan sebuah pelatihan untuk masyarakat menengah ke bawah yang terdiri dari orang bisu, cacat dan anak yang putus sekolah. Dengan adanya pelatihan itu, mereka dapat mengasah kemampuan mereka seperti membuat dompet, bordir, membatik serta membuat sepatu (Mayor & Zakaria, 2019). Selain itu, pengusaha bordir juga menyediakan layanan agar para pelanggan dapat mendesain pesanan mereka sendiri, seperti memesan desain baju/motif bordir yang mereka inginkan. Hal itu dilakukan agar kualitas pelayanan yang mereka berikan tetap terjaga dengan baik dan agar mampu bersaing dengan produk bordir yang ada di luar daerah (Ardiyanti et al., 2015).

d. Aspek Penguasaan Materi Pemberdayaan

Aspek penguasaan materi pemberdayaan merupakan upaya untuk menyelesaikan masalah substansial kemiskinan, solusi serta pendekatan terhadap pencapaian kemandirian masyarakat. Mayor & Zakaria, (2019) menjelaskan bahwa untuk mengatasi permasalahan tersebut ada beberapa pelayanan yang dilakukan oleh Dinkop maupun UMKM yang diberikan kepada

masyarakat maupun kepada pelaku UMKM di Bangil yaitu sebagai berikut:

- a) Untuk masyarakat, yaitu dengan adanya pemberian konsultasi untuk peningkatan kualitas SDM, peningkatan pendapatan serta usaha ekonomi produktif di berbagai sektor.
- b) Untuk pelaku UMKM, yaitu adanya konsultasi bisnis, pendampingan dan pengembangan kewirausahaan, adanya fasilitas akses pembiayaan melalui perbankan dan lembaga keuangan lainnya, layanan pendampingan pajak, adanya pelatihan yang melibatkan narasumber dari pelaku usaha maupun dari perguruan tinggi.

2. Input

Input menurut Sulistyani, (2017) merupakan potensi internal dari agen pembaharu dan potensi eksternal yang memiliki kontribusi dalam proses pemberdayaan. Adapun input berkaitan dengan sumber daya, *financial management* dan fasilitas yang diperlukan agen pembaharu dalam melakukan kegiatannya.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan orang yang menghasilkan barang atau jasa, memasarkan produk, mengalokasikan sumber daya finansial, mengawasi mutu dan merumuskan seluruh strategi dan tujuan organisasi. Widodo dalam Aisyah et al., (2017) mengatakan bahwa sumber daya manusia dapat dikatakan berkualitas manakala mereka mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Sedangkan menurut (Piwowar-Sulej, 2020) strategi Human Resources Management adalah dengan menumbuhkan budaya kepercayaan dan kerjasama antara pegawai dengan atasannya. Adanya MSDM adalah untuk memperoleh sumber daya manusia dalam jumlah dan kualitas yang tepat serta melakukan adanya peningkatan kualitas pegawai.

Data Nama Usaha dan Jumlah Pegawai UMKM Bordir 2020

No	Nama Usaha	Jumlah Pegawai	Usia Tua	Usia Muda
1	Novaisa Bordir	8	4	4
2	Luluk Bordir	40	30	10
3	Faiza Bordir	40	28	12

4	Nizar Bordir	30	15	15
5	Nina Bordir	35	24	11
6	Hidayah Bordir	10	5	5
7	Fath Bodir	40	25	15
8	Jordania Bordir	11	7	4
9	HNA Jaya Bordir	10	7	3
10	HM Ali Bordir	20	15	5
11	Haris Bordir	25	18	7
12	Azizah Bordir	26	15	11
13	Samsul Bordir	24	18	6
14	Aminah Bordir	28	20	8
15	Rameesa Bordir	28	19	9
	Jumlah	375	250	125

Sumber : wawancara

Adapun hambatan dari input adalah adanya kekurangan sumber daya manusia, menurut Ibu Yoenati Soewarno adalah karena kerajinan bordir merupakan bisnis yang sulit karena tidak hanya menjahit dan menyulam saja. Pada pembuatan kerajinan bordir diperlukan ketekunan yang cukup baik seperti mempertimbangkan warna kain, warna stick untuk bordir yang cukup sulit dalam pengerjaannya. Maka itu banyak generasi muda yang memilih pekerjaan lain yang lebih instan seperti bekerja di pabrik karena gaji yang diterima juga lebih besar daripada menjadi pengrajin bordir.

Pada awal pembentukan Bangkodir sudah terdapat kurang lebih 4000 pengrajin bordir yang bergabung dalam program ini dan hingga saat ini sudah terdapat sekitar 13.019 pengrajin bordir dengan 510 unit industri yang ada di Kecamatan ini. Sedangkan di kelurahan pogar sendiri khususnya yang ada di Sentra Bordir terdapat kurang lebih 375 pengrajin bordir yang tergabung dalam 15 industri tenun. Pegawai tersebut terdiri dari usia 18 – 55 tahun, dimana pengrajin yang ada diatas usia 35 tahun lebih banyak jumlahnya yaitu 67% daripada yang ada di bawah usia 35 tahun yaitu sekitar 33%.

Hal itu tentunya membuat tujuan dari adanya pemberdayaan ini belum dicapai secara maksimal karena kurangnya ketertarikan generasi muda akan program ini.

b. Fasilitas

Fasilitas merupakan sesuatu yang berupa uang atau benda yang bisa memperlancar pelaksanaan kegiatan usaha dan mencapai tujuan tertentu. Fasilitas merupakan sumber daya fisik yang harus ada sebelum suatu jasa ditawarkan kepada konsumen Tjiptono, (2019). Fasilitas yang dibutuhkan dalam produksi bordir tentunya bermacam-macam mulai dari mesin bordir, mesin jahit, kain maupun benang. Menurut Suprayitno dan Ria (2019) Manajemen Aset adalah program untuk mengelola fasilitas atau infrastruktur melalui siklus hidupnya agar dapat berfungsi secara berkelanjutan. Untuk menunjang hal tersebut, Pemkab Pasuruan memberikan bantuan berupa mesin kontrol komputer yang diletakkan di sentra bordir yang ada di Pogar. Mesin ini dapat membantu produksi dan desain baju sehingga apabila pengusaha bordir mempunyai banyak pesanan akan lebih efektif jika menggunakan mesin ini untuk mempersingkat waktu pengerjaan daripada menggunakan mesin manual (Pratama et al., 2016).

Mesin Kontrol Komputer



Sumber : Pengembangan Ekonomi Lokal Bordir Bangil

3. Process

Process merupakan seluruh kegiatan yang dilakukan secara bertahap dalam pemberdayaan masyarakat, menurut Sulistyani, (2017) ada beberapa pendekatan dalam proses pemberdayaan, yang terdiri atas:

a. Pendekatan *Capacity Building* untuk memberdayakan kelembagaan agen pembaharu.

Pendekatan ini bertujuan untuk membentuk anggota mereka agar cakap. Dalam mencapai hal

tersebut, mereka mengubah cara berfikir individu, meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta akses informasi agar produktivitas setiap individu dapat meningkat.

Dalam pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat yang melakukan usaha bordir, Pratama et al., (2016) menjelaskan Pemkab Pasuruan melalui Disperindag melakukan pelatihan kepada para pelaku usaha bordir melalui pelatihan PEL (Pengembangan Ekonomi Lokal). Pengembangan tersebut berupa pelatihan dan pembinaan kepada pelaku usaha bordir dalam berinovasi dalam desain maupun motif kerajinan bordir. Pihak Disperindag juga mengadakan kegiatan berupa pameran untuk memperkenalkan produk yang dihasilkan oleh para pengusaha bordir dan mereka juga membuka pintu untuk menjalin kerjasama dengan sejumlah mitra untuk pemasaran produk.

Pelatihan PEL Bordir Bangil



Sumber : Pengembangan Ekonomi Lokal Bordir Bangil

Dalam program pemberdayaan, tentunya ada anggaran dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan sejak awal pembentukan program ini. Dana yang dibutuhkan untuk program Bangkodir sendiri cukup besar yaitu sekitar Rp. 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) untuk perancangannya. Selain itu untuk mengatasi permodalan untuk pengusaha yang akan memulai usahanya, Pemkab menyuntikkan dana sebesar Rp. 2 miliar melalui Bank Bukopin. Karena untuk memulai usaha bordir sendiri menurut Pak Arif Wahyudi, salah satu pemilik usaha bordir mengatakan jika modal awal yang dibutuhkan adalah sekitar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk membeli empat unit mesin bordir (Ishomuddin, 2014).

Sehingga Pemerintah Kabupaten Pasuruan sudah dinilai cukup baik dalam proses pelatihan

maupun dalam anggaran untuk mendukung keberlangsungan program ini.

b. Pendekatan New Public Management untuk meningkatkan kemampuan manajerial agen pembaharu secara internal.

Dapat diketahui bahwa konsep NPM lebih menitikberatkan pada sektor ekonomi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas dalam pelayanan publik.

Dalam pemberdayaan masyarakat tersebut, pelaku usaha bordir menjalin kemitraan dengan beberapa pihak. Di pemerintahan, mereka menjalin kerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Koperasi Usaha Mikro Kabupaten Pasuruan. Kedua dinas tersebut berperan penting dalam melakukan pembinaan serta pelatihan kepada masyarakat dan pelaku usaha bordir. Selain itu, mereka juga bekerjasama dengan pihak swasta yaitu dengan pihak ekspedisi untuk mengirimkan barang produksi mereka kepada pihak yang memesan. Dengan adanya kerjasama yang dijalin dengan beberapa pihak tersebut maka pelaku usaha dapat lebih profesional terhadap kegiatan yang mereka lakukan.

c. Pendekatan Kinerja untuk meningkatkan kinerja organisasional agen pembaharu.

Dalam pemberdayaan masyarakat melalui Bangkodir, untuk meningkatkan kinerja dari masing-masing pengrajin dilakukan sebuah pelatihan seperti membuka kelas batik yang nanti outputnya akan dipadupadankan dengan bordir serta menjaring siswa SMK yang jurusan menjahit untuk bekerja sebagai pengrajin bordir. Selain itu, Dinkop juga memberikan pelatihan yang bersifat berkelanjutan kepada masyarakat umum yang ingin menggeluti usaha bordir sehingga pengembangan untuk pelaku usaha mikro bordir dapat lebih berkembang (Ardiyanti et al., 2015).

d. Pendekatan Substansial melalui pengorganisasian pembaharu *knowledge*.

Pendekatan ini berkaitan dengan peningkatan *knowledge*, *attitude*, dan *practice* (KAP) agar agen pembaharu dapat menguasai aspek substansi kemiskinan dan dapat menentukan solusi serta pendekatan yang tepat dalam menciptakan kemandirian masyarakat.

Untuk memperkenalkan program Bangkodir sendiri Pemerintah Kabupaten Pasuruan melakukan sosialisasi tentang kerajinan bordir di

desa yang ada di Kabupaten Pasuruan. Namun sosialisasi tersebut belum dilakukan secara maksimal sehingga masyarakat di desa-desa masih banyak yang masih belum produktif dan membuat kualitas sumber daya manusia menjadi rendah (Ardiyanti et al., 2015).

4. Output

Menurut Sulistyani, (2017) *output* adalah hasil akhir setelah berbagai proses pemberdayaan dilakukan sehingga dapat mencapai kompetensi sebagai agen pembaharu yang berdaya dan mampu melakukan pendampingan program secara bertahap kepada masyarakat. Dash et al., (2020) mengatakan bahwa citra dari merk harus menawarkan kualitas yang baik, meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan loyalitas dan komitmen bersama dengan kompetensi produk atau jasa yang ada.

Hasil nyata dari adanya pemberdayaan masyarakat melalui Bangkadir adalah masyarakat dapat menjadi pengrajin bordir. Setelah mendapat pelatihan dari pihak Disperindag maupun pihak Dinkop, pengrajin dapat melihat potensi yang ada di dalam dirinya seperti dalam membuat desain, membuat sepatu, membuat mukenah, dll. Sesuai dengan tujuan dari program ini yaitu masyarakat terutama perempuan dapat lebih produktif agar dapat meningkatkan taraf hidup mereka.

Produk Bordir Bangil



Sumber : Pengembangan Ekonomi Lokal Bordir Bangil

Data Produksi Bordir 2019 dan 2020

No	Nama Usaha	Produksi 2019	Produksi 2020
1	Novaisa Bordir	400	150
2	Luluk Bordir	3000	2000
3	Faiza Bordir	6000	3000
4	Nizar Bordir	2500	1500

5	Nina Bordir	2500	1800
6	Hidayah Bordir	500	200
7	Fath Bodir	3000	2000
8	Jordania Bordir	1000	700
9	HNA Jaya Bordir	700	250
10	HM Ali Bordir	500	200
11	Haris Bordir	800	400
12	Azizah Bordir	600	250
13	Samsul Bordir	800	400
14	Aminah Bordir	900	350
15	Rameesa Bordir	850	300
	Jumlah	24.800	13.500

Sumber : wawancara

Dari data itu dapat dilihat bahwa produksi bordir pada saat sebelum pandemi bisa mencapai 24.800 sedangkan saat pandemi menurun hingga 46%. Penurunan itu membuat sejumlah pengusaha mengalami berbagai kerugian terutama dari segi sumber daya manusia karena mereka juga harus membayar upah pengrajin bordir yang sudah membuat kerajinan itu.

5. Outcome

Outcome merupakan nilai yang ditimbulkan setelah agen pembaharu mempunyai tingkat pemberdayaan tertentu Sulistyani, (2017). *Outcome* ini dapat dilakukan dengan melakukan adanya evaluasi yang dilakukan oleh pihak terkait kepada kelompok sasaran. Sehingga setelah *output* yang telah diperoleh sebelumnya dapat menunjukkan tingkatan dari keberdayaan agen pembaharu.

Pada saat sebelum pandemi tentunya banyak pengusaha yang mempunyai banyak pesanan untuk produk bordir. Namun setelah pandemi, banyak pengusaha yang ada di Sentra Bordir mengalami penurunan pendapatan seperti yang dialami oleh Novaisa Bordir bahkan mereka harus mengurangi jumlah pegawai karena pandemi ini. Pengusaha Bordir yang ada di Sentra Bordir akhirnya menjual produk mereka di rumah ataupun galeri yang mereka miliki dan ada juga yang menjualnya secara online seperti di instagram dan di blog pribadi mereka untuk bertahan di tengah pandemi. Sehingga dari 15 industri yang ada

di Sentra Bordir, terdapat sekitar 67% yang masih berusaha bertahan ditengah pandemi. Sedangkan sisanya masih bisa bertahan karena sudah memiliki pelanggan tetap.

Pendapatan Sentra Bordir sebelum adanya pandemi bisa mencapai Rp. 700.000.000 namun setelah pandemi dan adanya penutupan Sentra Bordir pendapatan menurun menjadi Rp. 150.000.000 karena Sentra Bodir pada Tahun 2020 hanya dibuka sampai bulan Maret. hal itu tentunya mengakibatkan berbagai dampak kepada Sentra Bordir sendiri sehingga kawasan itu menjadi sepi. Dapat diketahui dari wawancara dengan Ibu Luluk pemilik Luluk Bordir bahwa upah untuk bordir manual adalah Rp. 18.000 sedangkan untuk bordir komputer untuk operator mesinnya bisa mencapai Rp. 60.000 – Rp. 70.000 per-shiftnya yaitu selama 8 jam. Tentunya pendapatan itu tergolong minim dibandingkan dengan tingkat ketelitian mereka dalam membuat kerajinan itu. Apalagi saat pandemi pesanan menjadi berkurang sehingga pendapatan juga tentunya menurun karena pendapatan pengrajin dihitung dari jumlah kerajinan yang mereka hasilkan. Untuk mengatasi hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Pasuruan melakukan pengadaan masker melalui UMKM yang bertujuan untuk mendukung UMKM yang terimbas Covid-19 sehingga mereka tetap produktif mengerjakannya di rumah.

Maka Pemerintah Kabupaten Pasuruan dapat dikatakan masih belum mampu untuk mencapai keberhasilan dari program ini karena masih belum ada upaya agar Sentra Bordir ini bertahan selama pandemi.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, pemberdayaan masyarakat melalui Bangkadir (Bangil Kota Bordir) di Kelurahan Pogar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan menggunakan teori Sulistyani yang menggunakan pendekatan CIPOO (*Context-input-process-output-outcome*).

1. Context

Adapun aspek yang digunakan untuk mengetahui pendekatan *context* meliputi aspek kelembagaan, aspek sistem manajemen, aspek kinerja organisasi dan aspek penguasaan materi pemberdayaan. Dari hasil dan pembahasan diatas dapat diketahui bahwa ketiga aspek (kelembagaan, kinerja organisasi dan penguasaan materi pemberdayaan)

sudah dapat dilakukan dengan baik. Namun pada aspek sistem manajemen masih ada kendala karena belum ada inovasi terbaru dan motif yang mereka gunakan sama dengan yang digunakan oleh bordir yang ada di kota lain.

2. Input

Input dari pemberdayaan masyarakat ini dapat dilihat dari sumber daya manusia dan fasilitas yang dimiliki untuk menunjang aktivitas pemberdayaan tersebut. Dalam sumber daya manusia, dapat diketahui bahwa lebih banyak pengrajin yang berada di usia lanjut daripada pengrajin yang ada di usia muda. Untuk fasilitas, Pemerintah Kabupaten Pasuruan memberikan mesin kontrol komputer yang diletakkan di Sentra Bordir yang dapat digunakan oleh pengusaha bordir apabila memiliki banyak pesanan.

3. Process

Pada *process* terdapat beberapa pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan *capacity building* untuk memberdayakan kelembagaan agen pembaharu, pendekatan *new public management* untuk meningkatkan kemampuan manajerial agen pembaharu secara internal, pendekatan kinerja untuk meningkatkan kinerja organisasional agen pembaharu dan pendekatan substansial melalui pengorganisasian pembaharu *knowledge*. Pada empat pendekatan tersebut, Pemkab Pasuruan mengadakan berbagai macam pelatihan kepada masyarakat untuk meningkatkan keterampilan mereka melalui Disperindag dan Dinkop. Namun sosialisasi terhadap program ini dinilai kurang karena Pemkab Pasuruan belum melakukan sosialisasi secara maksimal kepada masyarakat yang ada di desa-desa sehingga masih banyak masyarakat yang belum produktif.

4. Output

Output atau hasil akhir dari pemberdayaan masyarakat ini adalah terdapat adanya penurunan produksi karena pandemi Covid-19 sehingga pengusaha banyak mengalami kerugian.

5. Outcome

Proses terakhir adalah *outcome*, dari hasil dan pembahasan diatas dapat diketahui bahwa pada saat pandemi banyak pengusaha yang terhambat dalam pemasaran produknya karena ditutupnya Sentra Bordir sehingga mereka harus bekerja di rumah dan memasarkan produknya secara online. Upah pengrajin bordir juga tergolong minim

dibandingkan dengan keterampilan dalam pengerjaannya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan saran atau masukan dari pemberdayaan masyarakat tersebut, yaitu:

1. Adanya kenaikan upah untuk pengrajin bordir karena upah pada saat ini tergolong rendah.
2. Sosialisasi kepada generasi muda agar program ini bisa dapat tetap dilestarikan.
3. Pembuatan inovasi terbaru agar terdapat ciri khas tersendiri untuk motif bordir yang ada di Pasuruan.
4. Perlu adanya sosialisasi di desa-desa terpencil agar program ini dapat dilakukan oleh semua masyarakat yang ada di Kabupaten Pasuruan.
5. Adanya upaya agar Sentra Bordir dapat dibuka kembali dengan menerapkan protokol kesehatan agar pengusaha bordir dapat kembali memasarkan produknya.

Ucapan Terima kasih

Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam penyusunan artikel ini, diantaranya:

1. Tuhan Yang Maha Esa
2. Seluruh Dosen S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya.
3. Muhammad Farid Ma'ruf, S.Sos., M.AP. selaku dosen pembimbing.
4. Dr. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP dan Badrudin Kurniawan, S.AP., M.AP. selaku dosen penilai.
5. Serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada peneliti sehingga penulisan artikel ilmiah ini dapat diselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Abid. (2017). Pengaruh Kemampuan dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan UKM Bordir di Kecamatan Bangil.

Aisyah, M. F., Utami, W., Sunardi, & Sudarsih. (2017). Kualitas Sumber Daya Manusia , Profesionalisme Kerja , Dan Komitmen Sebagai Faktor Pendukung Peningkatan Kinerja Karyawan PDAM Kabupaten Jember (*Quality of Human Resources , Labour profesionalisme ,*

and commitment as a factor Supporting Employee Performa). *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, IV(1), 131–135.

Ardiyanti, L., Setyowati, E., & Suryadi. (2015). Strategi Pemberdayaan Pengrajin Bordir Melalui Kegiatan Ekonomi Kreatif (Studi pada Asosiasi Pengusaha Bordir Kelurahan Pogar Kecamatan Bangil dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan). *JAP (Jurnal Administrasi Publik)* 3(5), 733–738.

Dash, G., Kiefer, K., & Paul, J. (2020). Marketing-to-Millennials: Marketing 4.0, customer satisfaction and purchase intention. *Journal of Business Research*, 122(2), 608–620.

Ginanjari, R. A. F., Setyadi, S., & Suirah, U. (2018). Analisis strategi penanggulangan kemiskinan di provinsi banten. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 8(2), 227–248.

Hartadi, S., Fakhruddin, F., & Utsman, U. The Empowerment Strategy for Prostitutes Through Competency-Based Culinary Skills Training at Semarang Rehabilitation Center. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*. 6(1), 11-23.

Ishomuddin, D. W. (2014). Moncer Bersama Bangkodir. <https://majalah.tempo.co/read/jawa-timur/145120/moncer-bersama-bang-kodir>

Kippendorf, K. (2018). Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi. Jakarta: Citra Niaga Rajawali Press.

Mayor, D., & Zakaria, A. (2019). Pemberdayaan Pelaku Usaha Bordir Skala Mikro di Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan*, 4(2), 83–94.

Nanhthavong, V., Epprecht, M., Hett, C., Zaehring, J. G., & Messerli, P. (2020). Poverty trends in villages affected by land-based investments in rural Laos. *Journal Applied Geography*, 124(7), 2-3.

Nawangsari, E. R. (2017). Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Pada Usaha Menengah Kecil Dan Mikro (UMKM) (Studi Di Umkm Pengrajin Batik Kampoeng Jetis dan Pengrajin Koperasi Intako Tanggulangin

- Sidoarjo). *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 1(1), 12-15.
- Piowar-Sulej, K. (2020). Human resources development as an element of sustainable HRM – with the focus on production engineers. *Journal of Cleaner Production*, 278(6), 3.
- Pratama, R. A., Yuwono, J., Raharjo, L., & Sari, C. A. (2016). Pengembangan Ekonomi Lokal Bordir Bangil di Kabupaten Pasuruan.
- Sasmito, C., & Nawangsari, E. R. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Batu. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 3(2), 70-72.
- Saugi, W., & Sumarno. 2015 Pemberdayaan Perempuan Melalui Pelatihan Pengolahan Bahan Pangan Lokal. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan*. 2(2), 227-228.
- Sulistiyani, A. T. (2017). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Grava Media.
- Suparno. (2019). Evaluation of The National Urban Community Empowerment Program. *International Journal of Indonesian Society and Culture*, 11(1), 70.
- Suprayitno, D. K. (2018). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Sidoarjo.
- Suprayitno, H., & Ria, A. 2019. Reflection on Basic View of Public Infrastructure for Infrastructure Asset Management in Indonesia. *Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur dan Fasilitas*, 3(1), 16.
- Tjiptono, F. (2019). *Pemasaran Jasa*. Malang: Bayumedia.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.